

LAPORAN AKHIR

KKS PENGABDIAN LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2015



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA Mendukung KELANCARAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA ILOHELUMA KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oleh

Sri Indriyani S. Dai, SE, ME (Ketua) NIP. 19840124 200812 2 002

Fitri Hadi Yulia Akib, SE, ME (Anggota) NIP. 19820725 200801 2 010

Dibiayai oleh :
Dana PNBPU UNG, TA 2014
Dengan Surat Perjanjian No 586/UN47.D3/KU/2015

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2015**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN
KKS PENGABDIAN LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2015**

1. Judul Kegiatan KKS Pengabdian : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara
2. Lokasi Kegiatan : Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Sri Indriyani S. Dai, SE, ME
 - b. NIP : 19840124 200812 2 002
 - c. Jabatan/ Golongan : Lektor/ IIIc
 - d. Program Studi/Jurusan : S1 Ekonomi Pembangunan
 - e. Bidang Keahlian : Keuangan Daerah
 - f. Alamat Kantor : Jln. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
 - g. Alamat Rumah : Jln. Arif Rahman Hakim Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : 1 Orang
 - b. Nama Anggota/Keahlian : Fitri Hadi Yulia Akib, SE, ME/ Keu. Daerah
 - c. Mahasiswa yang terlibat : 30 Orang
5. Lembaga/ Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga/ Mitra : Kantor Desa Iloheluma
 - b. Penanggung Jawab : Saleha Pakaya
 - c. Alamat : Desa Iloheluma Kec. Anggrek
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra : ±90 KM
 - e. Bidang Kerja/ Usaha : Pemerintah Desa
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 Bulan
7. Sumber Dana : PNBPN UNG Tahun Anggaran 2015
8. Biaya Total : Rp. 25.000.000

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi UNG

Gorontalo, September 2015
Ketua Tim Pengabdian,

Dr. Hamzah Yunus, M. Pd
NIP. 19600223 198603 1 004

Sri Indriyani S. Dai, SE, ME
NIP. 19840124 200812 2 002

Menyetujui,
Ketua LPM Universitas Negeri Gorontalo

Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum
NIP. 19680409 199303 2 001

RINGKASAN

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara oleh Sri Indriyani S. Dai SE, ME dan Fitri Hadi Yulia Akib, SE, ME, Kuliah Kerja Sibermas Pengabdian Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015.

Program KKS Pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Iloheluma terdiri dari beberapa mekanisme, yakni: perencanaan alokasi dana desa, mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa, pelaksanaan alokasi dana desa, pengawasan alokasi dana desa, pertanggungjawaban alokasi dana desa dan transparansi alokasi dana desa.

Hasil-hasil pemberdayaan dari anggaran alokasi dana desa di Desa Iloheluma ditekankan pada tiga komponen yakni: pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Anugerah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir kuliah kerja sibermas dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara”.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKS periode Agustus-September tahun 2015 yang diprakarsai oleh LPM Universitas Negeri Gorontalo, memberikan dampak yang baik dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan utamanya yaitu mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, terdiri dari beberapa mekanisme, yakni: perencanaan alokasi dana desa, mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa, pelaksanaan alokasi dana desa, pengawasan alokasi dana desa, pertanggungjawaban alokasi dana desa dan transparansi alokasi dana desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Iloheluma yang ditekankan pada 3 (tiga) komponen penting yaitu pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia.

Untuk itu dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, juga terima kasih kepada berbagai pihak terutama Rektor, Pembantu Rektor juga Ketua LPM dan seluruh pihak yang telah banyak membantu terutama mengarahkan berbagai program kegiatan yang dilaksanakan sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Sibermas. Ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Kepala Desa Iloheluma, Camat Anggrek dan seluruh aparat terutama masyarakatnya yang bersedia menerima berbagai program ini.

Semoga kegiatan ini membawa rahmat bagi kita sekalian. Amiin.

Gorontalo, September 2015

Tim DPL

DAFTAR ISI

Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Potensi Unggulan dan Identifikasi Masalah	1
1.2 Usulan Penyelesaian Masalah	3
1.3 Teknologi / Metode yang dipakai untuk mengatasi masalah	4
1.4 Profil Kelompok Sasaran / Potensi / Permasalahan	5
BAB II TARGET DAN LUARAN	6
BAB III METODE PELAKSANAAN	7
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	11
BAB V TAHAPAN CAPAIAN	13
5.1 Gambaran Umum Desa Iloheluma	13
5.2 Hasil dan Pembahasan	22
BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	29
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	29
7.1 Kesimpulan	30
7.2 Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Kelompok Sasaran, Potensi Dan Permasalahannya	5
Tabel	2.1	Uraian Pekerjaan, Program dan Volumnya Dalam 2 Bulan	9
Tabel	5.1	Nama-Nama Kepala Desa Sebelum Dan Sesudah Berdiri Desa Iloheluma	15
Tabel	5.2	Aparatur Pemerintahan Desa Iloheluma	14
Tabel	5.3	Pelayanan Umum Pemerintahan Desa	15
Tabel	5.4	Kondisi Geografis	18
Tabel	5.5	Kondisi Perekonomian Desa Iloheluma	21
Tabel	5.6	Sarana Dan Prasarana Desa	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Struktur Organisasi Desa Iloheluma	16
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Potensi Unggulan Dan Identifikasi Masalah

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat Kabupaten/ Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Landasan Dasar Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 tahun 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Surat Edaran Menteri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 oktober 2006 perihal Atas Tanggapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Maksud pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik makin besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Pengelolaan alokasi dana desa di desa adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah desa dihadapkan pada kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih lemah. Hal tersebut sesuai dengan data penduduk berdasarkan pendidikan pada tahun 2014 yaitu: 167 penduduk tidak tamat sekolah, 284 penduduk tamatan SD, 35 penduduk tamatan SMP, 60 penduduk tamat SMA, dan tidak ada penduduk tamatan akademi maupun perguruan

tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Iloheluma masih rendah.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan berjalan dengan lancar tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa di desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara diantaranya: Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD), selain itu juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat.

Dari masalah yang teridentifikasi, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak diselesaikan dalam program KKS pengabdian adalah bagaimana memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

1.2. Usulan Penyelesaian Masalah

Untuk menyelesaikan masalah di atas, maka akan dilakukan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Tahap analisis/ identifikasi potensi; pada tahap ini yang harus diidentifikasi adalah jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh desa Iloheluma, program-program apa saja yang akan dibiayai oleh ADD, serta kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan khususnya dibidang teknis masih kurang memadai sehingga kondisi ini berdampak pada kurangnya efektifitas pelaksanaan program ADD tersebut.
2. Pendampingan; tahap ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), agar dalam penentuan kebijakan dalam pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD), selaras antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten.

3. Pelatihan; tahap ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para aparatur desa dalam hal mengelolah ADD, sehingga perlu diadakan kepada para pengelola alokasi dana desa dalam hal ini Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga penempatan dana alokasi desa tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan secara baik.

1.3. Metode Yang Digunakan Untuk Mengatasi Masalah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dapat dilakukan berbagai pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi, metode ini dilaksanakan oleh para aparatur desa dan didampingi oleh masyarakat dalam hal ini para pengelola alokasi dana desa di desa Iloheluma untuk mengidentifikasi jumlah alokasi dana desa yang akan diterima oleh desa Iloheluma, program-program apa saja yang akan dibiayai oleh ADD, serta kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan khususnya dibidang teknis masih kurang memadai sehingga kondisi ini berdampak pada kurangnya efektifitas pelaksanaan program ADD tersebut.
2. Metode pendampingan, metode ini dilaksanakan agar dalam penentuan kebijakan dalam pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD), selaras antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten. Stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3. Metode pelatihan, metode yang diadakan berupa pelatihan pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

1.4. Profil Kelompok Sasaran Dan Potensi/ Permasalahan

Kelompok sasaran dalam program KKS pengabdian ini adalah Pengelolaan alokasi dana desa di desa Iloheluma yakni Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan

pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Profil kelompok sasaran beserta potensi dan permasalahannya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.1. Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya

Kelompok Sasaran	Potensi	Permasalahan
Pengelola Alokasi Dana Desa	Adanya kesadaran aparat pemerintah desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Kualitas sumber daya aparatur masih rendah
Masyarakat	Adanya program pemberdayaan masyarakat yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat - Kurangnya komunikasi dari pengelola ADD dengan masyarakat.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

Kegiatan KKS Pengabdian ini membawa misi untuk membina dan memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Melalui program ini baik dosen dan mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan, ilmu dan keterampilan maupun teknologi untuk menangani kekurangan dan masalah yang dihadapi oleh aparat pemerintah desa dan masyarakat desa Iloheluma. Selain itu KKS pengabdian adalah kelas aplikasi bagi mahasiswa untuk dapat berinteraksi dan bekerja sama dengan masyarakat. Pada program ini yang fokus pada bidang pengelolaan keuangan dalam hal ini alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan alokasi dana desa di desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Adapun indikator capaian produk program KKS Pengabdian yang dituju adalah

1. Pengelolaan Keuangan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

1. Transparan

Masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang program pengelolaan alokasi dana desa.

2. Akuntabel

Tim pelaksana dalam hal ini pengelola alokasi dana desa mampu memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berwenang.

3. Partisipatif

Masyarakat terlibat secara aktif dalam program pengelolaan alokasi dana desa.

2. Pemberdayaan Masyarakat

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Operasionalisasi Program KKS Pengabdian terdiri atas 3 tahap yakni tahap persiapan dan pembekalan, tahap pelaksanaan dan rencana keberlanjutan program.

1.1. Persiapan dan Pembekalan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKS Pengabdian meliputi tahapan berikut ini:

1. Penyiapan dan Survei lokasi KKS Pengabdian
2. Koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan kegiatan KKS Pengabdian
3. Perekrutan mahasiswa peserta KKS Pengabdian kerjasama dengan LPM UNG
4. Pembekalan dan pengasuransian mahasiswa peserta KKS pengabdian
5. Persiapan materi pelatihan dan kelengkapan administrasi

Materi persiapan dan pembekalan mahasiswa mencakup teori dan praktek beberapa aspek dibawah ini:

1. Fungsi mahasiswa dalam KKS-Pengabdian dan panduan pelaksanaan KKS UNG.
2. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia.
3. Penatausahaan Dan PertanggungJawaban Keuangan Desa

Adapun pelaksanaan tahapan kegiatan KKS Pengabdian berlangsung Agustus-September 2015 sebagai berikut:

1. Acara pelepasan mahasiswa peserta KKS Pengabdian dari kampus UNG disertai tim dan dosen pembimbing lapangan.
2. Pengantaran 30 Orang mahasiswa peserta KKS pengabdian ke Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Penyerahan mahasiswa peserta KKS Pengabdian ke kantor kecamatan yang selanjutnya ke Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Monitoring dan evaluasi setiap dua minggu sepanjang periode kegiatan.
5. Penarikan mahasiswa peserta KKS Pengabdian

3.2. Pelaksanaan

Desa yang menjadi mitra pendampingan mahasiswa peserta KKS Pengabdian yakni desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan berjalan dengan lancar tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Namun, di Desa Iloheluma masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa diantaranya: Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yang pembiayaannya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), selain itu juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Sehingga program yang dilakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa. Program lainnya adalah program pemberdayaan masyarakat yang pembiayaannya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yakni; memberdayakan masyarakat dalam penggunaan Anggaran Dana Desa untuk peningkatan derajat kesehatan, untuk peningkatan pendidikan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Metode yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yakni:

1. Identifikasi potensi, metode ini dilaksanakan oleh para aparatur desa dan didampingi oleh masyarakat dalam hal ini para pengelola alokasi dana desa di desa Iloheluma untuk mengidentifikasi jumlah alokasi dana desa yang akan diterima oleh desa Iloheluma, program-program apa saja yang akan dibiayai oleh ADD, serta kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan khususnya dibidang teknis masih kurang memadai sehingga kondisi ini berdampak pada kurangnya efektifitas pelaksanaan program ADD tersebut.
2. Metode pendampingan, metode ini dilaksanakan agar dalam penentuan kebijakan dalam pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD), selaras antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten. Stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3. Metode pelatihan, metode yang diadakan berupa pelatihan pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Adapun langkah operasional untuk mengatasi permasalahan adalah:

1. Memberikan pemahaman mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Bentuk kegiatannya adalah menyelenggarakan pelatihan pengelolaan keuangan desa yang meliputi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
2. Mendampingi masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Dana Desa. Bentuk kegiatannya adalah memberdayakan masyarakat dalam penggunaan Anggaran Dana Desa untuk peningkatan derajat kesehatan, untuk peningkatan pendidikan, peningkatan ekonomi masyarakat.

Pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dihitung dengan menggunakan Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) dalam waktu dua bulan. Uraian tabel dalam bentuk program dan jumlah mahasiswa pelaksananya adalah:

Tabel 2.1. Uraian pekerjaan, Program dan Volumennya dalam 2 Bulan

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)	Keterangan
1	Praktek menyusun laporan keuangan	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	1728	6 orang mahasiswa (Akuntansi, Manajemen)
2	Praktek membuat surat pertanggungjawaban keuangan	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	1728	6 orang mahasiswa (Akuntansi, Manajemen)
3	Praktek mengoperasikan komputer	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	864	3 orang mahasiswa (Akuntansi,

				Manajemen)
4	Kegiatan Posyandu dan Penyuluhan kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan	864	3 orang mahasiswa (Akuntansi, Manajemen)
5	Proses belajar mengajar dan penyuluhan pertanian	Peningkatan Pendidikan	1728	6 orang mahasiswa (Akuntansi, Manajemen)
6	Pembuatan dan pemasaran produk disesuaikan dengan potensi masyarakat	Peningkatan ekonomi masyarakat	1728	6 orang mahasiswa (Akuntansi, Manajemen)
Total Volume Kegiatan			8640	30 orang

3.3. Rencana Keberlanjutan Program

Pada program KKS Pengabdian ini telah memiliki target untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur walaupun tingkat pendidikannya sebagian hanya lulusan SMA. Pola pendampingan yang dilakukan mahasiswa sangat menentukan keberlanjutan program ini. Hal yang paling penting adalah peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan alokasi dana desa baik pelaporan maupun pertanggungjawabannya. Selain itu ketika masyarakat diberdayakan diharapkan dapat mendukung kelancaran pengelolaan alokasi dana desa. Diharapkan dari Badan Pemberdayaan dan Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara dapat menambah program-program pemberdayaan masyarakat. Sehingga, Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara akan ditingkatkan ditahun-tahun yang akan datang dan kesejahteraan masyarakat Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara semakin meningkat.

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Hasil tema KKS pengabdian yang dicapai oleh LPM UNG dalam jangka panjang untuk suatu seri program KKS Pengabdian untuk pemberdayaan kelompok pengrajin kelapa di Desa Ilangata adalah peningkatan income perkapita yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada sektor usaha. Peningkatan melalui sektor usaha ini terutama bagi ibu-ibu rumah tangga dapat memberikan kontribusi penghasilan yang dapat menunjang kebutuhan rumah tangga dan masyarakat sekitar. Selain itu juga melalui program KKS pengabdian ini akan memberi kontribusi bagi peningkatan indeks pembangunan manusia. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan terutama dalam bidang kelapa khususnya minyak kelapa. Peningkatan indeks pembangunan manusia ini juga didukung dengan pendampingan mahasiswa yang memberikan wawasan dalam semangat enteprenuer.

Berdasarkan hal tersebut di atas LPM Universitas Negeri Gorontalo juga melaksanakan berbagai macam bantuan pengabdian adapun beberapa program lainnya yang telah diperoleh dalam bidang pengabdian pada masyarakat yang dikelola oleh LPM Universitas Negeri Gorontalo antara lain; pengabdian masyarakat bagi dosen muda sumber dana PNBPN sejumlah 50 judul, pengabdian masyarakat bagi dosen sumber dana BOPTN sejumlah 10 judul, pengabdian masyarakat bagi dosen sumber dana DIKTI; Program IBM bagi dosen sejumlah 1 judul, Program KKN-PPM bagi dosen dan mahasiswa sejumlah 2 judul, Program PM-PMP bagi dosen sejumlah 3 judul; Pengabdian masyarakat berupa kegiatan kemah bakti oleh dosen dan mahasiswa di desa binaan Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, Program kerjasama pengabdian masyarakat dengan instansi terkait antara lain; Program Inkubator Bisnis, kegiatan pembinaan 30 UKM Tenant selama 8 bulan kerjasama dengan Dinas Koperindag Prov. Gorontalo dan LPM UNG dengan pembiayaan dari kementerian Koperasi dan UMKM RI, Program BUMN Membangun Desa yakni kegiatan pembinaan bagi cluster pengrajin gula aren di desa binaan Mongiilo kerjasama BRI dengan LPM UNG, Program Pemuda Sarjana penggerak pembangunan di pedesaan yakni kegiatan pendampingan terhadap pemuda sarjana yang ditempatkan di desa kerjasama antara dinas DIKPORA Prov. Gorontalo dan LPM UNG dibiayai oleh KEMENPORA RI, Program peningkatan

ketrampilan tenaga Instruktur dan Pendamping di LPM UNG berupa kegiatan TOT Kewirausahaan bagi calon instruktur LPM UNG.

BAB V

TAHAPAN CAPAIAN

5.1. Gambaran Umum Desa Iloheluma

5.1.1. Profil Desa Ilohelumo

Pada Tahun 2008 Rembuk Atau Musyawarah Antar Masyarakat, Kepala Dusun, Para Imam, Untuk Memisahkan Desa Tolango Menjadi 2 Desa Pada Saat Itu Dari Pihak Pemerintah/Kepala Desa Belum Menerima Aspirasi Dari Masyarakat Untuk Minta Agar Dusun 3 Helumo Dipisahkan Menjadi Satu Desa Karena Pada Tahun 2007 Dusun 3 Helumo Sudah Mempunyai Jumlah 250 KK.

Pada awalnya Iloheluma adalah merupakan dusun bagian Desa Tolango, kemudian di mekarkan sebuah desa tepatnya pada tanggal 8 Maret 2008, sebagai Kepala Desa yaitu Salmon Mamu, setelah itu dibentuklah 4 (Empat) Dusun, setelah berumur 1 (Satu) Tahun diadakan pergantian Kepala Desa Bapak Sabran Molotolo, seiring dengan diadakannya pemilihan Kepala Desa Devinitif. Pada tanggal 2 Maret 2012 berakhir masa jabatan Bapak Sabran Molotolo sebagai penjabat sementara Kepala Desa Iloheluma, bertepatan dengan pemilihan Kepala Desa terpilih yaitu Ibu Saleha Pakaya pada tanggal 19 Maret 2012, Ibu Saleha Pakaya resmi dilantik sebagai Kepala Desa Iloheluma Periode 2012 S/d 2018. Desa Iloheluma yang mempunyai Luas Wilayah ± 1.712,87 Ha dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tolango
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Datahu
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Huyula
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Garapia

5.1.2. Sejarah Pemerintahan Desa Iloheluma

Karena Desa Iloheluma merupakan Desa Pemekaran, Maka Sejarah Pemerintah Desa Iloheluma yang sampai pada penyusunan laporan ini dapat digambarkan dalam daftar dibawah ini:

**Tabel 5.1. Nama-Nama Kepala Desa
Sebelum Dan Sesudah Berdiri Desa Iloheluma**

NO	NAMA	MASA JABATAN	ALAMAT	PENDIDIKAN	KET.
1	SALMON MAMU	2011-2012	Desa Iloheluma	SMA	Penjabat
2	SABRAN MOLOTOLO	2012-2012	Desa Iloheluma	SMA	Penjabat
3	SALEHA PAKAYA	2012-2018	Desa Iloheluma	SMA	Penjabat

5.1.3. Sejarah Pembangunan Desa

Tabel 5.2. Aparatur Pemerintahan Desa Ilohelumo

NO	NAMA	USIA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	SALEHA PAKAYA	43 TAHUN	KEPALA DESA	S M A
2	ISMET PEMBENGO	29 TAHUN	SEKRETARIS DESA	S M A
3	HALIM WOLINELO	37 TAHUN	KAUR KEUANGAN	S M A
4	HARIS PEMBENGO	38 TAHUN	KAUR PEMBANGUNAN	
5	SARTON NAUE	45 TAHUN	KAUR PEMERINTAHAN	S M S
6	FADLI POMONTOLO	24	KAUR UMUM	S M A

		TAHUN		
7	DAHLAN SULEMAN	56 TAHUN	KADUS HELUMO	S D
8	SAMSUDIN LIHAWA	44 TAHUN	KADUS ILOHELUMA	S D
9	SAMPIR DEMANTO	42 TAHUN	KADUS OLEBUHELI	S D
10	AZIS R DOE	43 TAHUN	KADUS BOTUTOMIE	S D

Tabel 5.3 Pelayanan Umum Pemerintahan Desa

NO	URAIAN	KEBERADAAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Pelayanan Kependudukan	Ada	-	Di Layani Di Kantor Desa
2	Pemakaman	Ada	-	Gotong Royong Rukun Duka
3	Perijinan	-	Tidak Ada	Langsung Di Kelola Oleh Pemda
4	Ketentraman Dan Ketertiban	Ada	-	Pos Kamling

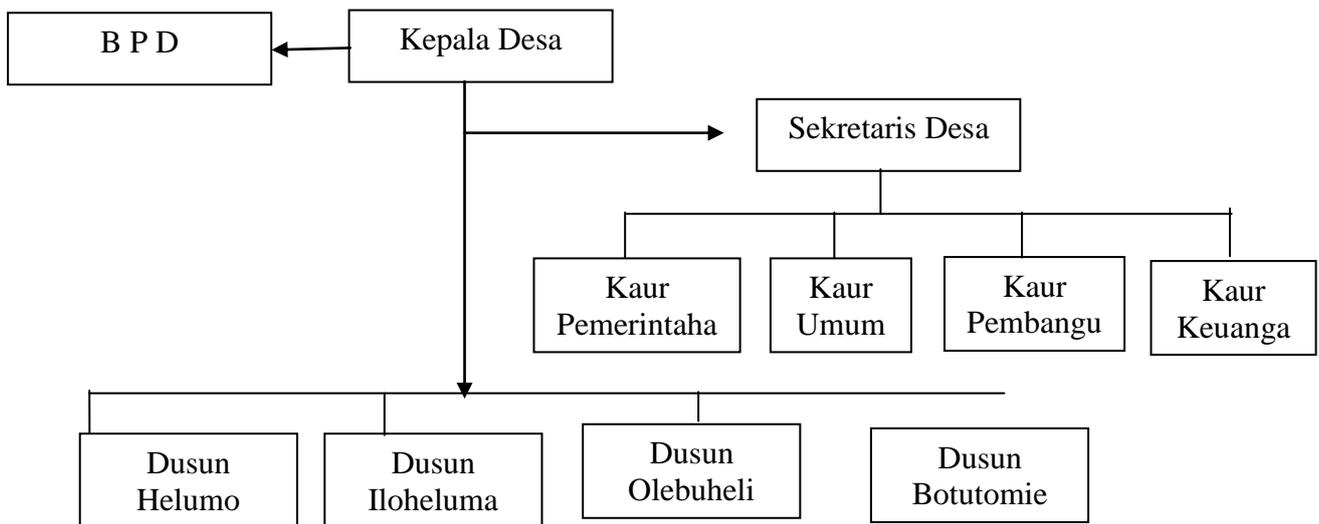
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap jam kerja
2. Ada beberapa lokasi pemakaman di Desa Iloheluma, tidak ada tim khusus yang menangani hal ini, prosesi pemakaman di pimpin oleh ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga.
3. Perijinan di antaranya adalah izin keramaian dan izin tinggal.

4. Izin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang mendatangkan masa dalam jumlah banyak, misalnya hiburan rakyat, pesta resepsi dan syukuran dan lainnya.

Satuan linmas memiliki anggota sebanyak personil dan satgas keamanan aktif dan setiap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil. Untuk pengamanan skala sedang dan besar dibentuk dari POLSEK Anggrek

STRUKTUR ORGANISASI DESA ILOHELUMA



1. Pemerintah Desa

- Kades : Saleha Pakaya
- Sekdes : Ismet Pembengo
- Kaur Pemerintah : Sarton Naue
- Kaur Pembangunan : Haris Pembengo
- Kaur Umum : Fadli Pomontolo
- Bendahara Desa : Halim Wolinelo

2. Nama Anggota BPD

- Ketua : Hais mamu
- Anggota : Rostin Abdulrahman
- Anggota : Fatma Koli
- Anggota : Sauda Djapar
- Anggota : Hais Mamu

3. Nama Anggota LPM

- Ketua : Nuning Wolinelo
- Sekretaris : Atin R Hiola
- Bendahara : Saleha Hiola
- Anggota : Wati Mahmu
- Anggota : Wisna Wolinelo

4. Nama Dusun Dan Kepala Dusun

- Dusun Helumo : Dahlan Suleman
- Dusun Iloheluma : Samsudin Lihawa
- Dusun Olebuheli : Sampir Demanto
- Dusun Botutomie : Azis R Doe

5. Unsur PKK

- Ketua : Agustina Mahmud
- Wakil Ketua :
- Sekretaris :
- Wakil Sekretaris :
- Bendahara :

5.1.4. Kondisi Geografis

Desa Iloheluma secara geografis terletak di tengah-tengah perdesaan di wilayah Kecamatan Angrek dan merupakan Desa Bagian Barat dari Ibu Kota Kabupaten Gorontalo Utara. Secara geografis kondisi Desa Iloheluma seperti pada table berikut :

Tabel.5.4. Kondisi Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Luas Wilayah : 1.712,87 Ha	
2.	Jumlah : 4 Dusun - Dusun I Helumo - Dusun II Iloheluma - Dusun III Olebuheli - Dusun IV Botutomie	
3.	Batas Wilayah - Utara Berbatasan Dengan Desa Tolango - Timur Berbatasan Dengan Desa Datahu - Selatan Berbatasan Dengan Desa Huyula - Barat Berbatasan Dengan Desa Garapia	
4.	Topografi - Luas Kemiringan Lahan (Rata-Rata) a. Datar 200 Ha b. Ketinggian Diatas Permukaan Laut (Rata-Rata) $\pm 15-17$ Derajat	
5.	Klimatologi - Suhu : ± 30 Derajat Celcius - Curah Hujan : $\pm 2000/3000$ Mm	

5.1.5. Kondisi Sosial

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Iliheluma Dapat Digambarkan Sebagai Berikut :

1. Kependudukan

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Dari jumlah penduduk yang berada paa kategori usia produktif laki-laki lebih sediki dari perempuan. Untuk lebih jelasnya data penduduk Desa Iloheluma pertahun 2012-2014 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk (jiwa) : 1.143 Jiwa
- b. Jumlah KK : 304 KK

- c. Jumlah laki-laki
 - 0 – 15 Tahun : 322 Jiwa
 - 16 – 55 Tahun : 322 Jiwa
 - Diatas 55 Tahun : 34 Jiwa
- d. Jumlah Perempuan
 - 0 – 15 Tahun : 115 Jiwa
 - 16 – 55 Tahun : 215 Jiwa
 - Diatas 55 Tahun : 154 Jiwa

2. Kesejahteraan Sosial

Meskipun atribut Desa IbuKota Kabupaten Melekat pada Desa Iloheluma namun dari data yang terlihat dibawah ini kondisi kesejahteraan penduduknya secara umum masih tetap didominasi oleh sejumlah KK Prasejahtera bahkan KK miskin.

- a. Jumlah KK Perasejahtera : 250 KK
- b. Jumlah KK Sejahtera : 25 KK
- c. Jumlah KK Kaya : 10 KK
- d. Jumlah KK Sedang : 20 KK
- e. Jumlah KK Miskin : 72 KK

3. Mata Pencaharian

Dari sisi mata pencahariannya penduduk Desa Iloheluma didominasi Oleh petani, pedagang dan industri kecil serta tukang, hal ini disebabkan oleh posisi Wilayah Desa Iloheluma berada dibagian barat ibu kota Gorontalo Utara, namun demikian ada pula beberapa penduduk yang memilih menjadi nelayan meskipun berada diluar wilayah Desa Iloheluma an profesi lainnya seperti pada data dibawah ini :

- a. Petani : 245 Orang
- b. Pedagang : 37 Orang
- c. Tukang : 11 Orang
- d. Karyawan : 1 orang
- e. PNS : 5 Orang
- f. Pensiunan : - Orang
- g. TNI/Polri : - Orang

- h. Perangkat Desa : 31 Orang
- i. Jasa : 2 Orang
- j. Industry Kecil : 10 Orang
- k. Pengrajin : - Orang
- l. Wiraswasta : 45 Orang
- m. Tukang Jahit : 2 Orang
- n. Peternak : - Orang

4. Agama

Seluruh warga Desa Iloheluma aalah Muslim (islam) dan Bahkan tidak ada yang beragama kristen seperti yang ditunjukkan data di bawah ini :

- a. Islam : 1.143 Orang
- b. Kristen : -
- c. Hindu : -
- d. Budha : -

5. Budaya

Kebudayaan seperti Turunani, berada dewasa ini sudah tidak terlalu dikenal lagi disebabkan oleh pergeseran nilai budaya dengan masuknya budaya barat seperti Band, Organ, dan Karaoke, hali ini perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat untuk menggali dan melestarikan kembali budaya dimaksud, termasuk Dana-Dana Tradisional, dikili(Zikir) dan kelompok Zamrah (dana-dana Tradisional) serta mi'raji (perayaan isra'mi'raj). Khusus untuk ada Upacara pernikahan dan upacara penguburan masih tetap terpelihara dengan baik.

6. Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendiikan cukup tinggi di Desa Iloheluma terlihat dari data di bawah ini:

- a. Tidak tamat SD : 110 Orang
- b. SD : 284 Orang
- c. SLTP : 125 Orang
- d. SLTA : 95 Orang
- e. Diploma/ Sarjana : 5 Orang

Desa Iloheluma dalam penyelenggaraan pendidikan setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan minimnya penduduk buta huruf. Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai, dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik Pemerintah Desa beserta Masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan.

Berikut ini adalah data penunjang sarana pendidikan berikut berikut peserta didik yang ada di Desa Iloheluma :

SLTA Jumlah Gedung : - Buah
 Jumlah Guru : - Orang
 Jumlah Murid : - Orang
 SLTP Jumlah Gedung : 1 Buah
 Jumlah Guru : 12 Orang
 Jumlah Murid : 246 Orang

7. Perekonomian Desa

Tabel 5.5. Kondisi Perekonomian Desa Ilohelumo

NO	SUMBER PENERIMAAN DESA	2011	2012	2013	2014
1	Pajak	-	Rp. 6.300.000	Rp. 6.936.00	-
2	Pendapatan Tanah Kas	-	-	-	-
3	DPDK/ADD	-	-	Rp.142.189.837	Rp.134.780.000
4	PADes	Rp. 3.000.000	Rp. 4.015.000	Rp. 6.090.000	-

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak, mulai tahun 2012 s/d 2013 mengalami peningkatan. Peningkatan tanah tahun 2012 ke tahun 2013 adalah sebesar 25,74 % adapun dari peningkatan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kenaikan Tarif Pengenaan Pajak
- b. Peningkatan keadaan perumahan/ pembangunan
 - DPD/ K adalah Dana Pembangunan Desa yang bersumber dari pemerintah, berdasarkan dana tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten.

- ADD atau Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten besaran Dana tiap tahun berubah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
- PAD adalah Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari kekayaan Desa, Swadaya partisipasi Masyarakat, pendapatan surat-surat izin dan surat Keterangan, sumbangan Pihak ketiga pendapatan yang lain yang sah.

8. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 5.6. Saran Dan Prasarana Desa

NO	JENIS PRASARANA DAN SARAN DESA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kantor Desa	1	Dusun Helumo
2	Kantor Secretariat BPD		
3	Kantor Secretariat LPM		
4	Gedung SLTA		
5	Gedung SLTP		
6	Gedung PAUD	2	Dusun Helumo
7	Gedung SD	2	Dusun Iloheluma
8	Gedung TK	-	
9	Masjid	3	Dusun I, II, Dan III
10	Jembatan	2	
11	Jalan Aspal	10 Km	Dusun I, II, III, Dan IV. (Batas Dusun Dan Desa)

5.2. Hasil dan Pembahasan

5.2.1. Hasil

Tujuan dari pelaksanaan Kuliah Kerja Sibermas Universitas Negeri Gorontalo tahun 2015 periode Agustus dan September adalah sesuai dengan tema “ Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah

yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/ Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, otonomi daerah secara tegas memberikan kewenangan kepada kabupaten dan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah secara baik, benar, transparan dan akuntabel. Berdasarkan hal tersebut, daerah memiliki kewenangan untuk mengurus kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam hal memberikan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat dan keswadayaan, prakarsa, inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar, di antaranya melalui pola pengalokasian pengelolaan dana desa atau Alokasi Dana Desa (ADD). ADD tersebut dibagikan kepada seluruh desa dalam Kabupaten Gorontalo Utara secara adil dan proposional dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan desa. ADD diberikan kepada desa dengan tujuan untuk :

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
- b) Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

Pada Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Iloheluma sebesar Rp. 134.780.000,- yang kemudian digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa,

maka dibentuklah organisasi pengelola alokasi dana desa yang meliputi tim pembina tingkat kabupaten, tim pengendali tingkat kecamatan, dan tim pelaksana tingkat desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Iloheluma terdiri dari beberapa mekanisme, yakni: perencanaan alokasi dana desa, mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa, pelaksanaan alokasi dana desa, pengawasan alokasi dana desa, pertanggungjawaban alokasi dana desa dan transparansi alokasi dana desa.

Hasil-hasil pemberdayaan dari anggaran alokasi dana desa di Desa Iloheluma ditekankan pada tiga komponen yakni: pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia.

5.2.2. Pembahasan

Sampai dengan tahun 2014, anggaran alokasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Iloheluma yaitu sebesar Rp. 134.780.000,- yang kemudian digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, maka dibentuklah organisasi pengelola alokasi dana desa yang meliputi tim pembina tingkat kabupaten, tim pengendali tingkat kecamatan, dan tim pelaksana tingkat desa. Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Iloheluma terdiri dari beberapa mekanisme yaitu:

1. Perencanaan ADD

Perencanaan alokasi dana desa yang merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan alokasi dana desa. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, selanjutnya kepala desa selaku penanggungjawab membentuk tim pelaksana alokasi dana desa yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara desa.

Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Di Desa Iloheluma, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD di Desa Iloheluma dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat.

2. Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD

Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD di Desa Iloheluma sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD di Desa Iloheluma secara teknis melalui beberapa tahap yakni; penyaluran alokasi dana desa dilakukan setelah DRK alokasi dana desa yang telah disusun dan disepakati beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi disampaikan kepada camat untuk diteliti. Selanjutnya, secara kolektif camat menyampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara dan diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka DPPKA D segera mentransfer dana ADD ke rekening Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Iloheluma.

3. Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan alokasi dana desa yang merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati. Alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan pada masing-masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksana tingkat desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa. Pelaksana kegiatan tersebut meliputi kepala desa, karang taruna, tim penggerak PKK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa.

Di Desa Iloheluma, pelaksanaan ADD cukup memberikan dampak positif terhadap peningkatan kegotong-royongan masyarakat maupun dalam

pembangunan sarana dan prasarana desa. Namun dampak negatif yang muncul dari keberadaan program ADD, seperti timbulnya ketergantungan desa terhadap dana tersebut, sehingga upaya pemerintah desa untuk mendapat sumber keuangan sendiri menjadi berangsur-angsur memudar.

Pelaksanaan ADD sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan ADD masih belum optimal seperti masih tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan, masih rendah, belum adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan juga belum optimalnya keswadayaan dari masyarakat.

4. Pengawasan ADD

Pengawasan alokasi dana desa yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana desa.

Pengawasan di Desa Iloheluma dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan.

Pengawasan pengelolaan ADD secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara maupun Kecamatan yang menyelenggarakan pengawasan. Pengawasan secara fungsional Di Desa Iloheluma yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 2 kali dalam satu tahun.

Disisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa masih belum nampak bahkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan adanya program tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyelewengan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.

5. Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, di Desa Iloheluma cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dilakukan secara administratif dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan format keuangan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD di Desa Iloheluma hanya dilakukan hanya 2 kali dalam setahun yakni pada saat pencairan ADD dan pada akhir tahun.

6. Transparansi ADD

Transparansi alokasi dana desa yang hanya dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait yang membahas pertanggungjawaban alokasi dana desa. Sedangkan masyarakat tidak mempunyai antusiasme dengan upaya yang dilakukan pemerintah desa tersebut.

Di Desa Iloheluma belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Hal tersebut didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11, bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Iloheluma ditekankan pada 3 (tiga)

komponen penting yaitu pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia.

Pemberdayaan lingkungan dialokasikan untuk pembangunan sarana/prasarana fisik yang dapat menunjang mobilitas masyarakat desa. Di Desa Iloheluma pemberdayaan lingkungan yang menggunakan alokasi dana desa yakni perbaikan beberapa poros jalan yang mulai rusak, penimbunan halaman kantor desa, dan pembangunan jembatan. Namun disisi lain, hal tersebut bertentangan dengan makna pemberdayaan lingkungan yang sesungguhnya yaitu sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan. Alangkah baiknya jika biaya pemberdayaan lingkungan digunakan untuk penanaman pohon kembali atau penghijauan dan upaya pelestarian lingkungan lainnya.

Pemberdayaan ekonomi dialokasikan untuk kegiatan simpan pinjam ibu-ibu PKK sebagai upaya pelaksanaan program PKK yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa, pelatihan kewirausahaan dan meningkatkan keterampilan, berupa pelatihan pembuatan produk yang disesuaikan dengan potensi masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Sedangkan pemberdayaan manusia dialokasikan untuk menunjang kegiatan kepemudaan melalui karang taruna yang digunakan untuk belanja perlengkapan olahraga dan seni. Pemberdayaan manusia lainnya digunakan untuk menunjang program PKK yaitu kegiatan simpan pinjam yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa.

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Proses yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Sibermas Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo tahun 2015 adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat di Desa Ilohelumo baik kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat yang merupakan program kegiatan inti maupun kegiatan-kegiatan tambahan lainnya yang dapat membantu masyarakat di Desa Ilohelumo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam program kegiatan inti tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya para pengelola alokasi dana desa dan masyarakat desa Iloheluma. Identifikasi potensi dan pendampingan sangat menentukan keberlanjutan program ini. Hal yang paling penting adalah peningkatan pengetahuan melalui pelatihan dalam pengelolaan alokasi dana desa baik pelaporan maupun pertanggungjawabannya. Selain itu ketika masyarakat diberdayakan diharapkan dapat mendukung kelancaran pengelolaan alokasi dana desa.

Rencana tahapan berikutnya diharapkan Alokasi ADD yang sesuai kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan negara kemasyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Iloheluma diharapkan senantiasa menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif sehingga akan terwujud pelaksanaan *good governance* di tingkat pemerintahan desa. Di samping itu Pemerintah Desa Iloheluma juga memanfaatkan prinsip dimaksud sebagai media proses pembelajaran masyarakat sehingga memiliki kesadaran yang tinggi akan arti pentingnya pembangunan yang merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ilohelumo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara secara normatif dan administratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus di perbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggung-jawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut.
2. Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat Desa Iloheluma yang didanai oleh anggaran alokasi dana desa meliputi pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan manusia. Wujud dari pemberdayaan lingkungan hanya berupa pembangunan infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan makna pemberdayaan lingkungan sesungguhnya yaitu upaya untuk perawatan dan pelestarian lingkungan. Pemberdayaan ekonomi dialokasikan untuk kegiatan simpan pinjam ibu-ibu PKK sebagai upaya pelaksanaan program PKK yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa, pelatihan kewirausahaan dan meningkatkan keterampilan, berupa pelatihan pembuatan produk yang disesuaikan dengan potensi masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Sedangkan, pemberdayaan manusia dialokasikan untuk menunjang kegiatan kepemudaan melalui karang taruna yang digunakan untuk belanja perlengkapan olahraga dan seni. Pemberdayaan manusia lainnya digunakan untuk menunjang program PKK yaitu kegiatan simpan pinjam yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa.

7.2. Saran

1. Pemerintah desa Iloheluma harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut

mengambil bagian didalamnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuka forum-forum dialog antara pemerintah desa dengan masyarakat atau bisa juga dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. Dengan cara tersebut, secara tidak langsung dapat merangsang partisipasi masyarakat dalam menyuarkan aspirasi mereka.

2. Pemerintah desa seharusnya memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban anggaran ADD kepada masyarakat desa. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menulis dan menempelkan penggunaan anggaran ADD di papan pengumuman desa karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan anggaran ADD tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2013. Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Kementerian Dalam Negeri 2007. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta, Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (c. 3) Jakarta.
- Sahdan, Goris dkk. 2004. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa. Yogyakarta, FPPD.
- Sumaryadi, I Nyoman 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, Citra Utama.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

www.prodeskel.go.id

LAMPIRAN 1
PETA LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM KKS PENGABDIAN



Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

LAMPIRAN 2
BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PELAKSANA

BIODATA KETUA TIM

1. Nama : Sri Indriyani S. Dai, SE, ME
 2. NIP : 19840124 200812 2002
 3. Tempat, Tanggal lahir : Gorontalo, 24 Januari 1984
 4. Program Studi : S1 Ekonomi Pembangunan
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
 5. Alamat Kantor : Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
 Alamat Rumah : Jln. Arif Rahman Hakim Kel. Wumialo Kec. Kota
 Tengah Kota Gorontalo, Hp. 081241581163

6. Pendidikan

No	Universitas/ Lokasi	Gelar	Tahun Selesai	Bidang Studi
1.	Universitas Sam Ratulangi/ Manado	SE	2006	IESP/ Ekonomi Perencanaan
2.	Universitas Sam Ratulangi/ Manado	ME	2010	Ek.Pembangunan/ Keuangan Daerah

7. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Kedudukan
1.	2010	Kajian Penentuan Indikator Kemiskinan Lokal Di Provinsi Gorontalo	Anggota
2.	2011	Kajian Identifikasi Masalah dan Pemetaan Potensi UMKM di Wilayah Kota Gorontalo	Anggota
3.	2012	Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo	Ketua
4.	2013	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Gorontalo	Ketua

5.	2013	Survey Sosial Ekonomi Dalam Rangka Pengembangan Demplot Kelapa Kopyor Berbasis Perkebunan Rakyat Di Lokasi Pengembangan Wisata Pantai Di Provinsi Gorontalo	Anggota
6.	2014	Pemetaan UMKM di Kota Gorontalo Berdasarkan Pola dan Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi	Anggota

8. Pengalaman Pengabdian kepada masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Kedudukan
1.	2010	Pendidikan Dan Pengajaran Keaksaraan Bagi Warga Buta Aksara di Desa Pentadio Timur Kec. Talaga Kab. Gorontalo	Anggota
2.	2012	Pelatihan Program Parenting Bagi Pendidik PAUD di Kelurahan Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo	Anggota
3.	2014	Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Rotan Dan Eceng Gondok Sebagai Kerajinan Tangan di UD. Aneka Rotan Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo	Anggota
4.	2014	Pelatihan Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Di Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo	Ketua

9. Publikasi Ilmiah

No	Judul Publikasi	Nama Jurnal	Tahun Terbit
1.	Peranan Usaha Kecil Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia	Jurnal Kebijakan Publik, UNG (Tidak Terakreditasi)	2009
2.	Analisa Kemampuan Keuangan	Jurnal Kebijakan Publik,	2009

	Dan Tingkat Ketergantungan Provinsi Sulawesi Utara Pada Era Desentralisasi Fiskal	UNG (Tidak Terakreditasi)	
3.	Dana Perimbangan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo	Jurnal Hukum Legalitas, UNG (Tidak Terakreditasi)	2012
4.	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Gorontalo	Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis, UNG (Tidak Terakreditasi)	2014

Gorontalo, September 2015

Ketua Tim



Sri Indriyani S. Dai, SE, ME

NIP. 19840124 200812 2 002

BIODATA TIM PELAKSANA

1. Nama : Fitri Hadi Yulia Akib, SE, ME
2. NIP : 19820725 200801 2 010
3. Tempat, Tanggal lahir : Gorontalo, 25 Juli 1982
4. Program Studi : S1 Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
5. Alamat Kantor : Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Alamat Rumah : Jln. Jl. Sawah Besar Kelurahan Heledulaa Utara Kota Timur Gorontalo
Hp. 085256083443

6. Pendidikan

No	Universitas/ Lokasi	Gelar	Tahun Selesai	Bidang Studi
1.	Universitas Sam Ratulangi/ Manado	SE	2007	IESP/ Ekonomi Perencanaan
2.	Universitas Sam Ratulangi/ Manado	ME	2010	Ekonomi Pembangunan/ Keuangan Daerah

7. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Kedudukan
1.	2011	Pengaruh komponen belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Gorontalo	Ketua
2.	2012	Kinerja Pelayanan Akademik Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG	Anggota
3.	2012	Dampak Perbedaan Siklus RPJMD dan RPJMN Pada Perencanaan dan Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo	Anggota

4.	2013	Kaji Ulang Program Agropolitan Jagung Provinsi Gorontalo	Anggota
5.	2014	Implementasi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo	Anggota

8. Pengalaman Pengabdian kepada masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Kedudukan
1.	2011	Efektivitas Zakat Pada Majelis Taklim Raudhatul Quran Kelurahan Tenda Kota Gorontalo	Anggota
2.	2012	Pelatihan Tata Persuratan Sekolah Di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai	Anggota
3.	2014	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat Melalui Penentuan Produk Unggulan Inovatif di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo	Anggota

9. Publikasi Ilmiah

No	Judul Publikasi	Nama Jurnal	Tahun Terbit
1.	Analisis Kinerja Makro Ekonomi Provinsi Gorontalo	Lembaga Pengkajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis FEB/ jurnal kajian ekonomi dan bisnis Oikos-Nomos	2010
2.	Analisis Fokus dan Relevansi Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo dengan Nasional	Lembaga Pengkajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis FEB/ jurnal kajian ekonomi dan bisnis Oikos-Nomos	2014

Gorontalo, September 2015

Anggota

Fitri Hadi Yulia Akib, SE, ME
 NIP. 19820725 200801 2 010